

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RENJA TAHUN 2021

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Landasan Hukum.....	3
1.3.	Maksud dan Tujuan	6
1.4.	Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKD TAHUN 2017	11
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra	11
2.1.1	Gambaran Umum Kinerja OPD	11
2.1.2	Evaluasi Capaian dan Evaluasi Program/ Kegiatan Tahun 2017	12
2.1.3	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017	15
2.1.4	Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018	21
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	34
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD	36
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	51
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	60
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	60
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	62
3.3	Program dan Kegiatan	66
BAB VII	PENUTUP.....	73

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan *Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman* menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2021.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang perencanaan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, 05 Mei 2020

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



MASRI, ST, MM

NIP. 19691122 199403 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja BPKD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2021.

Renja BPKD Tahun 2021 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja BPKD Tahun 2021 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Dengan demikian, Renja BPKD Tahun 2021 adalah salah satu bahan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

Oleh Sebab itu karena Tahun 2021 adalah Tahun ke lima atau terakhir pelaksanaan RPJMD 2016-2021, maka untuk menyusun RKPD dan Renja OPD kita mempedomani :

- 1) RPJPN Tahun 2005-2025,
- 2) RPJMN Tahun 2014-2020,
- 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2005-2025,
- 4) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025,
- 5) RPJMD Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja BPKD tahun 2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra BPKD tahun keempat. Sebagai perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan Pengelolaan Keuangan Daerah dan memiliki fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang keuangan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang keuangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BPKD Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
24. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKD disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja BPKD adalah :

1. Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyesuaian program dan kegiatan BPKD.
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan BPKD sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;

3. Menyelaraskan program dan kegiatan BPKD dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja BPKD disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

2.1.1 Gambaran Umum Kinerja OPD

2.1.2 Evaluasi Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019

2.1.3 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019

2.1.4 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD

2.1.1 Gambaran Umum Kinerja OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Pengelola Keuangan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta melihat Visi Bupati Padang Pariaman, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”**, maka Misi yang diemban pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah **“Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik”**.

Pelaksanaan kegiatan BPKD Tahun 2019 secara umum selaras dengan Renja BPKD 2019. Pelaksanaan program dan kegiatan BPKD Tahun 2019 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2019. Renja BPKD pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020 dan perkiraan capaian target tahun 2020.

2.1.2 Evaluasi Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 dan DPA Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman selaku OPD mempunyai target pendapatan Asli Daerah Rp. 57.635.050.856,00 dengan realisasi Rp. 60.221.940.506,01 atau sebesar 104,49% dan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 13.807.246.113,15 dengan realisasi belanja secara keseluruhan sebesar Rp. 13.069.062.164,00 atau sebesar 94,65%, dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.023.610.841,06 dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 5.752.776.027,00 atau sebesar 95,50%, anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.783.635.272,09 dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.316.286.137,00 atau sebesar 94,00%.

Hasil Renja BPKD Tahun 2019 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi out put yang diharapkan.

Tabel 2.1
Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
A	Program perencanaan pembangunan daerah	57,000,000.00	50,017,050.00	87.75
1	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	33,000,000.00	29,886,800.00	90.57
2	Penyusunan KUA dan PPAS	24,000,000.00	20,130,250.00	83.88
B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,454,434,000.00	1,389,504,440.00	95.54
3	Penyediaan jasa surat menyurat	263,323,000.00	259,960,700.00	98.72
4	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	170,000,000.00	147,112,702.00	86.54
5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8,900,000.00	5,643,050.00	63.41
6	Penyediaan jasa administrasi keuangan	281,360,000.00	275,515,000.00	97.92
7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	53,476,000.00	53,462,000.00	99.97
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30,000,000.00	20,911,200.00	69.70

9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13,200,000.00	11,051,000.00	83.72
10	Penyediaan makanan dan minuman	48,375,000.00	42,005,140.00	86.83
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	212,600,000.00	204,243,648.00	96.07
12	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	373,200,000.00	369,600,000.00	99.04
C	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	715,117,000.00	684,790,900.00	95.76
13	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	271,777,000.00	271,777,000.00	100.00
14	Pengadaan peralatan gedung kantor	280,340,000.00	266,242,500.00	94.97
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30,000,000.00	29,795,450.00	99.32
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	93,000,000.00	77,565,450.00	83.40
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	40,000,000.00	39,410,500.00	98.53
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000.00	39,818,796.00	79.64
18	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50,000,000.00	39,818,796.00	79.64
19	Penyusunan Standar Operasional Prosedur BPKD	0.00	0.00	0.00
E	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	262,722,625.00	251,406,871.00	95.69
20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60,000,000.00	56,731,525.00	94.55
21	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	20,120,625.00	19,915,525.00	98.98
22	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	99,102,000.00	94,745,947.00	95.60
23	Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD	70,000,000.00	67,004,874.00	95.72
24	Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD	13,500,000.00	13,009,000.00	96.36
F	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3,394,337,216.06	3,250,184,036.00	95.75
25	Klinik Akuntansi/ Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	21,510,000.00	17,401,745.00	80.90
26	Verifikasi Piutang PBB	215,000,000.00	205,946,416.00	95.79
27	Pengelolaan dan Penatausahaan Dana BOS dan JKN	28,000,000.00	23,974,500.00	85.62
28	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan PNSD	136,090,000.00	134,838,222.00	99.08
29	Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi	79,500,000.00	69,547,630.00	87.48
30	Persiapan dan Pelaksanaan Penganggaran E-budgeting	9,700,000.00	9,454,808.00	97.47
31	Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30,000,000.00	27,499,500.00	91.67
32	Pengelolaan Kas Daerah	21,500,000.00	16,643,370.00	77.41
33	Pemutakhiran Data Pajak	139,050,000.00	131,434,900.00	94.52
34	Penatausahaan Belanja Langsung	45,000,000.00	38,600,900.00	85.78
35	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	50,000,000.00	47,505,580.00	95.01
36	Pengadaan Cetak Blok dan Peta ZNT PBB	78,400,000.00	76,397,300.00	97.45
37	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	133,000,000.00	132,761,889.00	99.82
38	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	1,075,000.00	1,075,000.00	100.00
39	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan redistribusi	0.00	0.00	0.00
40	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	763,505,001.06	749,949,750.00	98.22
41	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	69,385,000.00	67,503,750.00	97.29

42	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	91,925,000.00	87,452,600.00	95.13
43	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	54,500,000.00	51,993,800.00	95.40
44	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	46,700,000.00	46,380,500.00	99.32
45	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	45,500,000.00	45,500,000.00	100.00
46	Penunjang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda)^)	19,025,000.00	18,702,456.00	98.30
47	Penyusunan Laporan Aset /Barang Daerah^)	75,000,000.00	67,813,195.00	90.42
48	Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah^)	70,800,000.00	68,710,900.00	97.05
49	TP-TGR^)	9,000,000.00	7,227,500.00	80.31
50	Implementasi Simda Barang Milik Daerah^)	60,000,000.00	57,471,200.00	95.79
51	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah^)	111,366,343.00	110,229,200.00	98.98
52	Fasilitasi Penerbitan DPA dan SPD^)	19,900,000.00	15,640,000.00	78.59
53	Sosialisasi PBB dan BPHTB	90,000,000.00	89,757,900.00	99.73
54	Kodefikasi dan Pencekungan Aset*)	59,200,000.00	53,346,100.00	90.11
55	Bimbingan teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD untuk PPK dan Bendahara*)	32,613,032.00	30,795,357.00	94.43
56	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD^)	42,500,000.00	39,708,119.00	93.43
57	Sosialisasi Cukai Tembakau^)	101,985,216.00	95,735,000.00	93.87
58	Implementasi Aplikasi Persediaan	20,000,000.00	17,593,750.00	87.97
59	Operasional Pemungutan PAD	512,514,784.00	503,937,399.00	98.33
60	Penyusunan Standar Biaya dan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD	30,000,000.00	13,210,000.00	44.03
61	Bimbingan Teknis Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk bendahara pengeluaran SKPD-SKPD	0.00	0.00	0.00
62	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	32,000,000.00	29,401,800.00	91.88
63	Penerbitan SPPT PBB dan DHKP	49,092,840.00	49,042,000.00	99.90
G	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	90,000,000.00	87,053,934.00	96.73
64	Pengelolaan Dana Transfer, Dana Perimbangan dan Bagi Hasil^)	90,000,000.00	87,053,934.00	96.73
JUMLAH		6,023,610,841.06	5,752,776,027.00	95.50

2.1.3 Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2019

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Padang Pariaman memiliki 7 (Tujuh) Program dan Enam Puluh Empat (64) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri atas 10 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 1.454.434.000,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan

sebesar **Rp 1,389,504,440.00** atau **95,54%**. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi keuangan pada 10 kegiatan dibawah ini kurang dari 100% karena adanya beberapa faktor penyebab di lapangan dan efisiensi penggunaan dana.

Tabel 2.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1 Tahun	263,323,000.00	259,960,700.00	98.72
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	170,000,000.00	147,112,702.00	86.54
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 kl/Tahun	8,900,000.00	5,643,050.00	63.41
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bln / Tahun untuk 42 Org	281,360,000.00	275,515,000.00	97.92
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	a. 1 Tahun, b. 1 Gedung	53,476,000.00	53,462,000.00	99.97
6	Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	30,000,000.00	20,911,200.00	69.70
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	10 Exsplar	13,200,000.00	11,051,000.00	83.72
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	48,375,000.00	42,005,140.00	86.83
9	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	1 Tahun	212,600,000.00	204,243,648.00	96.07
10	Penyediaan jasa Pendukung Adm Perkantoran	12 Bln/ Tahun 18 Orang	373,200,000.00	369,600,000.00	99.04
JUMLAH			1,454,434,000.00	1,389,504,440.00	95.54

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri atas 5 Kegiatan dengan indikator capaian program berupa peningkatan pelayanan aparatur, indikator masukan yaitu dana total **Rp. 715.117.000,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp. 684.790.900,00** atau **95,76%** Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi keuangan pada 5

kegiatan dibawah ini kurang dari 100% karena adanya efisiensi dalam penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1 unit	271,777,000.00	271,777,000.00	100.00
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	8 unit	280,340,000.00	266,242,500.00	94.97
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung	30,000,000.00	29,795,450.00	99.32
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	14 kend	93,000,000.00	77,565,450.00	83.40
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	40,000,000.00	39,410,500.00	98.53
JUMLAH			715,117,000.00	684,790,900.00	95.76

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terdiri atas 2 kegiatan dengan indikator capaian program berupa peningkatan kinerja aparatur, indikator masukan yaitu dana total **Rp 50.000.000,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp 39.818.796,00** atau **79,64%**. Pada pelaksanaan program ini, tidak semua kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Satu kegiatan terpaksa dihilangkan anggaran karena terjadi pengurangan anggaran OPD.

Tabel 2.4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 orang	50,000,000.00	39,818,796.00	79.64
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur BPKD	10 dokumen	0.00	0.00	0.00
JUMLAH			50,000,000.00	39,818,796.00	79.64

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Terdiri atas 5 kegiatan dengan indikator capaian program berupa kualitas laporan keuangan dan Penyaluran bantuan keuangan, indikator masukan yaitu dana total **Rp. 262.722.625,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp. 251.406.871,00** atau **95,69%**. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi keuangan pada 5 kegiatan dibawah ini kurang dari 100%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

No	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dok	60,000,000.00	56,731,525.00	94.55
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	20,120,625.00	19,915,525.00	98.98
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	99,102,000.00	94,745,947.00	95.60
4	Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD	100%	70,000,000.00	67,004,874.00	95.72
5.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD	1 Dokumen	13,500,000.00	13,009,000.00	96.36
JUMLAH			262,722,625.00	251,406,871.00	95.69

E. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terdiri atas 39 kegiatan dengan indikator capaian program berupa terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas, indikator masukan yaitu dana total **Rp. 3.394.337.216,06** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp. 3.250.184.036,00** atau **95,75%**. Pada pelaksanaan program ini, 37 kegiatan indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat

mencapai target yang ditetapkan dan 2 kegiatan dihilangkan anggaran karena pemotongan anggaran OPD. Realisasi keuangan pada kegiatan – kegiatan dibawah ini kurang dari 100% karena adanya beberapa faktor penyebab di lapangan dan efisiensi dalam penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Klinik Akuntansi/ Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	44 OPD	21,510,000.00	17,401,745.00	80.90
2	Verifikasi Piutang PBB	20 %	215,000,000.00	205,946,416.00	95.79
3	Pengelolaan dan Penatausahaan Dana BOS dan JKN	2108 Dokumen	28,000,000.00	23,974,500.00	85.62
4	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan PNSD	1664 Dokumen	136,090,000.00	134,838,222.00	99.08
5	Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi	1 Dokumen	79,500,000.00	69,547,630.00	87.48
6	Persiapan dan Pelaksanaan Penganggaran E-budgeting	100 %	9,700,000.00	9,454,808.00	97.47
7	Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	87 Dokumen	30,000,000.00	27,499,500.00	91.67
8	Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	21,500,000.00	16,643,370.00	77.41
9	Pemutakhiran Data Pajak	1 Dokumen	139,050,000.00	131,434,900.00	94.52
10	Penatausahaan Belanja Langsung	4000 Dokumen	45,000,000.00	38,600,900.00	85.78
11	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	3000 Dokumen	50,000,000.00	47,505,580.00	95.01
12	Pengadaan Cetak Blok dan Peta ZNT PBB	660 Peta	78,400,000.00	76,397,300.00	97.45
13	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	1 Dokumen	133,000,000.00	132,761,889.00	99.82
14	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	1,075,000.00	1,075,000.00	100.00
15	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	2 Dokumen	0.00	0.00	0.00
16	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	1 Dokumen	763,505,001.06	749,949,750.00	98.22
17	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1 Dokumen	69,385,000.00	67,503,750.00	97.29
18	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	1 Dokumen	91,925,000.00	87,452,600.00	95.13
19	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	54,500,000.00	51,993,800.00	95.40
20	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	46,700,000.00	46,380,500.00	99.32
21	Penyusunan rancangan peraturan	1 Dokumen	45,500,000.00	45,500,000.00	100.00

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				
22	Penunjang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda)^)	100 %	19,025,000.00	18,702,456.00	98.30
23	Penyusunan Laporan Aset /Barang Daerah^)	2 Dokumen	75,000,000.00	67,813,195.00	90.42
24	Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah^)	2 Dokumen	70,800,000.00	68,710,900.00	97.05
25	TP-TGR^)	1 Tahun	9,000,000.00	7,227,500.00	80.31
26	Implementasi Simda Barang Milik Daerah^)	44 OPD	60,000,000.00	57,471,200.00	95.79
27	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah^)	44 OPD	111,366,343.00	110,229,200.00	98.98
28	Fasilitasi Penerbitan DPA dan SPD^)	4 Kali/Tahun	19,900,000.00	15,640,000.00	78.59
29	Sosialisasi PBB dan BPHTB	17 Kali	90,000,000.00	89,757,900.00	99.73
30	Kodefikasi dan Pengecekan Aset*)	1 Dokumen	59,200,000.00	53,346,100.00	90.11
31	Bimbingan teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD untuk PPK dan Bendahara*)	132 Orang	32,613,032.00	30,795,357.00	94.43
32	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD^)	10 %	42,500,000.00	39,708,119.00	93.43
33	Sosialisasi Cukai Tembakau^)	1 Kali	101,985,216.00	95,735,000.00	93.87
34	Implementasi Aplikasi Persediaan	44 OPD	20,000,000.00	17,593,750.00	87.97
35	Operasional Pemungutan PAD	85 %	512,514,784.00	503,937,399.00	98.33
36	Penyusunan Standar Biaya dan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD	3 Buku	30,000,000.00	13,210,000.00	44.03
37	Bimbingan Teknis Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk bendahara pengeluaran SKPD-SKPD	132 Orang	0.00	0.00	0.00
38	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	15 Unit	32,000,000.00	29,401,800.00	91.88
39	Penerbitan SPPT PBB dan DHKP	186000 Dokumen	49,092,840.00	49,042,000.00	99.90
J U M L A H			3,394,337,216.06	3,250,184,036.00	95.75

F. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program berupa terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas, indikator masukan yaitu dana total **Rp. 90.000.000,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp. 87.053.934,00** atau **96,73%**. Kegiatan Pengelolaan Dana Transfer, Dana Perimbangan dan Bagi Hasil, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7

Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pengelolaan Dana Transfer, Dana Perimbangan dan Bagi Hasil	75 Dokumen	90,000,000.00	87,053,934.00	96.73
J U M L A H			90,000,000.00	87,053,934.00	96.73

2.1.4 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019

Untuk melihat Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPKD dan realisasi APBD dapat kita lihat secara terperinci dalam (*tabel 2.1.*):

Tabel 2.8
Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun 2019

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2019	Realisasi Renja OPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.04 . 4.04.01. 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Out Come : Persentase kebutuhan Administrasi perkantoran yg terpenuhi	96,50%	96,50%	96,80%	96,80%	100	97,20%	97,20%	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Out Put: Jumlah Surat yg distribusikan tepat waktu	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Out Put : Jumlah tagihan yg dibayar tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Out Put: Jumlah kendaraan yg memperoleh perpanjangan pajak kendaraan bermotor	1 kl/Tahun	1 kl/Tahun	1 kl/Tahun	1 kl/Tahun	100	1 kl/Tahun	1 kl/Tahun	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Out Put : Jumlah Anggaran untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	100	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Out Put: a.Jumlah Pengadaan Peralatan dan Bahan kebersihan b. Jumlah Gedung yg memperoleh penyediaan jasa kebersihan bangun	a. 1 Tahun , b. 1 Gedung	1 Tahun , b. 1 Gedung	1 Tahun , b. 1 Gedung	1 Tahun , b. 1 Gedung	100	1 Tahun , b. 1 Gedung	1 Tahun , b. 1 Gedung	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Out Put: Jumlah Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Out Put: Jumlah npaket bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10 Exsplar	10 Exsplar	10 Exsplar	10 Exsplar	100	10 Exsplar	10 Exsplar	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Out Put: a.Jumlah waktu terlaksananya penyediaan makan dan minum tamu b. jlh waktu terlaksananya penyediaan makan minum rapat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Out Put: Jumlah waktu tersedianya anggaran rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Derah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran^)	Out Put: Jumlah Anggaran Pembayaran Tenaga Honorer	12 Bln/ Tahun untuk 18 Org	12 Bln/ Tahun untuk 18 Org	12 Bln/ Tahun untuk 18 Org	12 Bln/ Tahun untuk 18 Org	100	12 Bln/ Tahun	12 Bln/ Tahun	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Out Come: Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	97,20%	97,20%	97,50%	97,50%	100	97,80%	97,80%	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Out Come: Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas			1 Unit	1 Unit	100			
4.04 . 4.04.01. 01 . 02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Out Put: Jumlah Paket peralatan gedung kantor	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100	1 gedung	1 gedung	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Out Put: Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1 gebung	1 gebung	1 gebung	1 gebung	100	1 gebung	1 gebung	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Out Put: a. Jlh mobil memperoleh jasa service b. jlh mobil yg memperoleh suku cadang c. jlh mobil yg memperoleh penyediaan bahan bakar	14 kend	14 kend	14 kend	14 kend	100	14 kend	14 kend	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Out Put: Jumlah Perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Out Come: Persentase Meningkatnya kualitas SDM aparatur BPKD	95,50%	95,50%	96%	96%	100	96,50%	96,50%	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Out Put: Meningkatnya SDM PNS yang Mengikuti Pelatihan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100	4 orang	4 orang	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 05.17	Penyusunan Standar Operasional Prosedur BPKD (SOP)	Out Put: Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Out Come: 1. Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah, 2. Persentase Dana Hibah dan Bansos yang Tersalurkan	1. (0 Temuan), 2. (100)	1. (0 Temuan), 2. (100)	1. (0 Temuan), 2. (100)	1. (0 Temuan), 2. (100)	100	1. (0 Temuan), 2. (100)	1. (0 Temuan), 2. (100)	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Out Put: Jumlah dokumen Renstra, Renja, Tapkin, RKA, DPA, Lakip, dan LPPD.	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	100	9 Dok	9 Dok	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Out Put: Jumlah Laporan Keuangan Semesteran.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Out Put: Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 06.05	Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD	Out Put : Persentase Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 06.05	Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD	Ouput. Jumlah Laporan Keuangan SKPKD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase SDM Pengelola Keuangan OPD yang Terlatih, 2. Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat, 3. Persentase OPD dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu, 4. Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD, 5. Persentase Pencapaian Target PAD, 6. Persentase BMD yang tercatat dengan Akurat, 7. Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat, 8. Persentase BMD yang Tertib, 9. Persentase Peningkatan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), 10. APBD Tepat Waktu	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 90%, 5. 90%, 6, 100%, 7. 100%, 8. 50%, 9. 10%, 10. 30 Nov 2018	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 90%, 5. 90%, 6, 100%, 7. 100%, 8. 50%, 9. 10%, 10. 20 Nov 2018	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 91%, 5. 92%, 6, 100%, 7. 100%, 8. 55%, 9. 10%, 10. 20 Nov 2019	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 91%, 5. 92%, 6, 100%, 7. 100%, 8. 55%, 9. 10%, 10. 20 Nov 2019	100	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 94%, 5. 93%, 6, 100%, 7. 100%, 8. 60%, 9. 10%, 10. 30 Nov 2020	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 94%, 5. 93%, 6, 100%, 7. 100%, 8. 60%, 9. 10%, 10. 30 Nov 2020	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.35	Penerbitan SPPTPBB dan DHKP	Out Put: jlh Penerbitan SPPT dan DHKP	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	100	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 15.36	Klinik Akuntansi/ Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Out Put: Jlh Konsultasi OPD dalam Laporan penyusunan Laporan Keuangan	Org/44 OPD	Org/44 OPD	Org/44 OPD	Org/44 OPD	100	Org/44 OPD	Org/44 OPD	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.37	Verifikasi Piutang PBB	Out Put: Persentase Piutang PBB yang Teridentifikasi	20 %	20 %	20 %	20 %	100			
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.38	Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bos dan JKN	Out Put: 1. Jumlah Rekonsiliasi Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah, 2. Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana BOS, 3. Jumlah Data Rekonsiliasi Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Nasional, 4. Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Penegsahan Pendapatan dan Belanja Dana JKN Kapitasi	1.4 Dokumen, 2.1.800 dokumen, 3. 4 Dokumen, 4. 300 Dokumen	1.4 Dokumen, 2.1.800 dokumen, 3. 4 Dokumen, 4. 300 Dokumen	1.4 Dokumen, 2.1.800 dokumen, 3. 4 Dokumen, 4. 300 Dokumen	1.4 Dokumen, 2.1.800 dokumen, 3. 4 Dokumen, 4. 300 Dokumen	100	1.4 Dokumen, 2.1.800 dokumen, 3. 4 Dokumen, 4. 300 Dokumen	1.4 Dokumen, 2.1.800 dokumen, 3. 4 Dokumen, 4. 300 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.01	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Out Put: jumlah rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		0	2 Dokumen	2 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Out Put: Jumlah Penyusunan Ramperda tentang APBD.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 15.03	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Out Put: Jumlah rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran. APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Out Put: Jumlah Penyusunan Ramperda Perubahan APBD.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.05	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Out Put: , Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Out Put: Jlh Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Out Put: Jlh Peraturan KDH Tentang Peretanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.10	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Data Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD, 2. Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil,	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2	100	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2	100

		3. Jumlah Data Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNSD, 4. Jumlah Data Rekonsiliasi Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil, 5. Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, 6. Jumlah Satuan Kerja (Bendahara) Bimbingan Aplikasi Simgaji, 7. Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan PNSD	Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen		Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.11	Penunjang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda)^)	Out Put: Persentase Kualitas SDM OPD pengelola Sistem Informasi Keuangan Simda	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.12	Penyusunan Laporan Semesteran Aset/Barang Daerah^)	Out Put: Terlaksananya Penyusunan Laporan Semesteran.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.14	Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah^)	Out Put: Jumlah Penghapusan dan pelelangan BMD	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.15	TP-TGR^)	Out Put: Jumlah Sidang Majelis TP-TGR.	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	100	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.16	Implementasi Simda Barang Milik Daerah^)	Out Put: Jumlah OPD yang Asetnya Terinputkan ke Simda	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	100	44 OPD	44 OPD	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 15.17	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah^)	Out Put: Jumlah OPD yang dibina	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	100	44 OPD	44 OPD	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.18	Fasilitasi Penerbitan DPA dan SPD ^)	Out Put: Jlh Penerbitan DPA dan SPD OPD	4 Kali/Tahun	4 Kali/Tahun	4 Kali/Tahun	4 Kali/Tahun	100	4 Kali/Tahun	4 Kali/Tahun	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.19	Kodefikasi dan Pencekungan Aset*)	Out Put: Jlh Dokumen Aset yang tertata	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.20	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan OPD dan PPK Bendahara	Out Put: Jumlah Peserta Bimtek Laporan Keuangan	132 Org/44 OPD	132 Org/44 OPD	132 Org/44 OPD	132 Org/44 OPD	100	132 Org/44 OPD	132 Org/44 OPD	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.21	Implementasi Aplikasi Persediaan	Out Put: Jumlah OPD Asetnya terimputkan ke Simda BMD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	100	44 OPD	44 OPD	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.24	Penyusunan Standar Biaya dan buku petunjuk juknis Pelaksanaan APBD	Out Put: Jlh Buku standar biaya dan petunjuk juknis pelaksanaan APBD	3 Buku	3 Buku	3 Buku	3 Buku	100	3 Buku	3 Buku	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.27	Bimbingan Teknis Penyusunan Surat Pertanggungjawabana (SPJ) untuk Bendahara Pengeluaran OPD- OPD	Out Put: Jumlah Peserta Bimtek Laporan Keuangan			132Org/44 OPD		0			

4.04 . 4.04.01. 01 . 15.28	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	Out Put: Jlh Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	15 Unit	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.29	Sosialisasi PBB dan BPHTB [^])	Out Put: Jumlah Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan	17 Kali	17 Kali	17 Kali	17 Kali	100	17 Kali	17 Kali	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.31	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD	Out Put: Persentase Data Objek Pajak yang falid	1	1	1	1	100	1	1	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.32	Sosialisasi cukai tembakau [^])	Out Put: Jumlah kegiatan sosialisasi cukai tembakau	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100	1 Kali	1 Kali	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.33	Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi	Out Put: Jlh Data Objek Pajak dan Retribusi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.35	Operasional Pemungutan PAD	Out Put: Persentase Realisasi Pemungutan PAD	85%	85%	85%	85%	100	85%	85%	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.36	Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Out Put: Persentase Realisasi Pemungutan PAD	100%	100%						
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.37	Persiapan dan Pelaksanaan Penganggaran E-budgeting	Out Put: Persentase Pelaksanaan anggaran E Budgeting	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 15.38	Monitoring dan Evaluasi Persiapan dan Pelaksanaan Penganggaran E-budgeting	Out Put: Jumlah Dokumen Laporan Monev	1 Dokumen	1 Dokumen						
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.39	Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP 8%, 2. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP dan Askes Subsidi, 3. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP Taperrum, 4. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP 8%, JKK dan JKN, 5. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP dan Askes Subsidi, 6. Jumlah Data Rekonsiliasi Taperrum	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 6 Dokumen, 5. 8 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 6 Dokumen, 5. 8 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 6 Dokumen, 5. 8 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 6 Dokumen, 5. 8 Dokumen, 6. 1 Dokumen	100	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 6 Dokumen, 5. 8 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 6 Dokumen, 5. 8 Dokumen, 6. 1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.41	Pengelolaan Kas Daerah	Out Put: Jlh Laporan Penatausahaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.43	Pemutakhiran Data Pajak	Out Put: Jlh data Pajak yang terinventarisir	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.45	Penatausahaan Belanja langsung	Out Pu: Jumlah Dokumen Penerbitan dan Pengesahan Belanja (SP2D UP, SP2D TU, SP2D GU, SP2D GU dan TU Nihil, SP2D LS)	4.000 Dokumen	4.000 Dokumen	4.000 Dokumen	4.000 Dokumen	100	4.000 Dokumen	4.000 Dokumen	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 15.46	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	Out Put: Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan belanja tidak langsung (Gaji dan Tunjangan PNSD, Gaji dan Tunjangan Ketua dan Anggota DPRD, Alokasi Dana Desa dan Dana Nagari, Hibah dan Bantuan Keuangan, Pengembalian Belanja, Non Anggaran, Insentif)	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	100	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.38	Pelaksanaan Penerbitan SP2D	Out Put: Jumlah SP2D yang Diterbitkan	6.000 Dokumen	6.000 Dokumen						
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.38	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Out Put: Jumlah Rekonsiliasi data pengelolaan keuangan daerah dalam 1 th	15 kali	15 kali						
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.38	Penerbitan Surat penghentian Pembayaran (SKPP)	Out Put: Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP)	300 Dokumen	300 Dokumen						
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.44	Penyusunan Sistem dan Prosedur (Sisdur) Penatausahaan Keuangan Kabupaten	Out Put: Jumlah Dokumen Sisdur Penatausahaan Keuangan Kabupaten			1 Dokumen		0			
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.47	Pengadaan Cetak Blok dan Peta ZNT PBB	Out Put: Jumlah Peta yang di cetak			60 Peta	60 Peta	100			

4.04 . 4.04.01. 01 . 15.48	Pemuktahiran Data Pajak	Out Put: Jumlah Dokumen ZNT			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.49	Intensiifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah	Out Put: Jumlah Dokumen Objek Pajak			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 16	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Out Come: Persentase Realisasi Terlaksananya Dana Transfer dan Bagi Hasil Dari Pusat	96%	96%	96,50%	96,50%	100	97,00%	97,00%	100
4.04 . 4.04.01.0 1 . 16.01	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Dana DAK Fisik, 2. Jumlah Laporan Realisasi DAK Non Fisik, 3. Jumlah Laporan Realisasi DID, 4. Jumlah Laporan Realisasi DBH, 5. Jumlah Laporan Realisasi Dana Desa, 6. Jumlah Laporan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	100	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01.0 1 . 17	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan tepat Waktu	30 Nov 2018	30 Nov 2018	30 Nov 2019	30 Nov 2019	100	30 Nov 2020	30 Nov 2020	100
4.04 . 4.04.01.0 1 . 17.01	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Out Put: Julah Dokumen KUA dan PPAS setelah perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01.0 1 . 17.02	Penyusunan KUA dan PPAS	Out Put : Julah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan namun belum lagi optimal.

Melihat kondisi tersebut KPA BPKD Kabupaten Padang Pariaman selaku Pengelola Badan Pengelola Keuangan Daerah mencoba untuk mensinergikan pengelolaan Keuangan melalui :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsisten antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun Capaian Kinerja Pelayanan BPKD sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra BPKD tahun 2016-2021 dapat kita lihat pada (tabel 2.9 terlampir) :

Tabel 2. 9
Pencapaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	Satuan	Target Kinerja						Realisasi Kinerja			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019
Urusan Wajib													
1	Melakukan Perumusan Kebijakan Teknis dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan wewenang yang dimiliki	Jumlah Perda APBD yang ditetapkan pada 1 tahun/ jumlah Perbub APBD ditetapkan dalam 1 tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Penunjang untuk Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Keuangan Meliputi Pelaksana Pendapatan, Pengelola asset Daerah, Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan.	Menunjukkan Jumlah Kegiatan Pendapatan Asli Daerah (P A D) serta Menghimpun Aset Aset Daerah.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2. 10
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Renstra

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Laporan Keuangan Daerah
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Pengelolaan BMD
			Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPKD

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pemerintah dibidang Pengelola keuangan dalam urusan wajib yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok meksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKD mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang Keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keuangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Keuangan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Keuangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang urusan Pengelola Keuangan dengan uraian tugas sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 rincian Uraian Tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman disebutkan bahwa :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
 1. Subbid Pendataan
 2. Subbid Penetapan
 3. Subbid Monev & Pelaporan Pendapatan.
4. Bidang Penagihan
 1. Subbid Pajak Daerah
 2. Subbid Penagihan PBB & BPHTB
 3. Subbid Pendapatan Lainnya
4. Bidang Anggaran terdiri dari :
 1. Subbid Perencanaan Anggaran;
 2. Subbid Pengendalian Anggaran
 3. Subbid SKPKD
5. Bidang Aset terdiri dari :
 1. Subbid Administrasi Aset
 2. Subbid Mutasi Aset
 3. Subbid Pemanfaatan / Pemberdayaan Aset
6. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 1. Subbid Pengelolaan Kas Daerah
 2. Subbid Belanja Langsung
 3. Subbid Belanja Tidak Langsung

7. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 1. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja
 2. Subbid Monev dan Pelaporan
 3. Subbid Pembinaan Keuangan Daerah.

1. KEPALA BPKD

Uraian Tugas Kepala BPKD

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis badan;
 - b. perumusan kebijakan umum bidang Keuangan;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan Keuangan dalam rangka mencapai target kinerja badan;
 - d. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - f. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan;
 - g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
 - h. koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Uraian Tugas Sekretaris BPKD

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Badan serta membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/ daerah di lingkungan Badan;
 - d. pengelolaan urusan ASN;
 - e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - f. koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ringkasan Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

2) Sub Bagian Keuangan

Ringkasan Tugas Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan

Ringkasan Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan

Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

3. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah, konsultasi informasi pengawasan dan pengendalian Pendapatan, perumusan kebijakan teknis pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah, pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud fungsi :
ayat (1), Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai
 - a. penyusunan perencanaan program bidang pendataan dan penetapan.
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
 - c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pendataan dan penetapan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan Subbid Pendataan dan Subbid Penetapan;
 - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbid monev dan pelaporan pendapatan;

- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Subbid Pendataan

Ringkasan Tugas Subbid Pendataan

Subbid Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan.

2) Subbid Penetapan

Ringkasan Tugas Subbid Penetapan

Subbid Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penetapan.

3) Subbid Monev dan Pelaporan Pendapatan

Ringkasan Tugas Subbid Monev dan Pelaporan Pendapatan

Subbid Monev dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas Meyiapkan Laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

4. BIDANG PENAGIHAN

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Penagihan

- (1) Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan prosedur penagihan dan keberatan, pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi dan pendapatan daerah lainnya dan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penagihan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang penagihan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
 - c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Penagihan;

- d. perumusan kebijakan tentang system dan prosedur penagihan dan keberatan;
- e. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
- f. penyelenggaraan kegiatan urusan Subbid pajak daerah;
- g. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbid Penagihan PBB dan BPHTB;
- h. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Subbid Pajak Daerah

Ringkasan Tugas Subbid Pajak Daerah

Subbid Pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah untuk masa pajak berjalan maupun sudah lewat waktu jatuh tempo, pengwasan pajak dan retribusi yang dikelola badan pengelola keuangan daerah.

2) Subbid Penagihan PBB dan BPHTB

Ringkasan Tugas Subbid Penagihan PBB dan BPHTB

Subbid Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas Menyampaikan Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Wajib pajak PBB/BPHTB, menerbitkan surat tagihan PBB/BPHTB dan menerima dan memproses penerbitan surat persetujuan dan /atau penolakan permohonan kebertain pajak.

3) Subbid Pendapatan Lainnya

Ringkasan Tugas Pendapatan Lainnya

Subbid Pendapatan lainnya mempunyai tugas Melaksanakan pendataan dan rencana kerja dalam melaksanakan penagihan pendapatan lainnya dan mengumpulkan bahan dan data serta Informasi tentang pendapatan daerah lainnya.

5. BIDANG ANGGARAN

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Anggaran

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas Menyiapkan konsep perumusan prosedur Penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, penyusunan petunjuk teknis anggaran serta pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan dalam pelaksanaan dana Hibah dan bansos sesuai ketentuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Anggaran;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan bidang anggaran;
 - d. persiapan konsep perumusan prosedur Penyusunan rancangan APBD
 - e. persiapan konsep perumusan prosedur Penyusunan rancangan Perubahan APBD;
 - f. pengendalian penyusunan Anggaran;
 - g. penyusunan buku petunjuk teknis anggaran
 - h. pengelolaan Dana Hibah dan Bansos serta ketentuan lainnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Subbid Perencanaan Anggaran

Ringkasan Tugas Subbid Perencanaan Anggaran

Subbid Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan Anggaran, melaksanakan verifikasi RKA/RKPA OPD dan DPA /DPPA serta menyiapkan bahan penyusunan DPA/DPPA OPD dan menyiapkan bahan standar harga satuan pokok kegiatan tahunan anggaran berkenan.

2) Subbid Pengendalian Anggaran

Ringkasan Tugas Subbid Pengendalian Anggaran

Subbid Pengendalian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan Penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah, menyusun pedoman pelaksanaan APBD, menyusun standar biaya, meneliti DPA-SKPKD dan DPD-OPD serta melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran.

3) Subbid SKPKD

Ringkasan Tugas Subbid SKPKD

Subbid SKPKD mempunyai tugas Mengelola pelaksanaan Anggaran Hibah dan Bansos Daerah, melaksanakan verifikasi data hibah dan bansos serta mengelola dana nagari sesuai ketentuan.

6. BIDANG ASET

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

- (1) Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah, pemanfaatan pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah serta pemeliharaan penyimpanan penyaluran, perawatan sesuai ketentuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
 - (1) Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Aset;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Aset;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Bidang Aset;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang Aset;
 - e. persiapan rancangan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;

- f. penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan barang milik daerah;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Subbid Administrasi Aset

Ringkasan Tugas Subbid Administrasi Aset

Subbid Administrasi Aset mempunyai tugas Menyiapkan RKBMD dan RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD serta penyusunan standar harga barang sesuai ketentuan.

2) Subbid Mutasi Aset

Ringkasan Tugas Subbid Mutasi Aset

Subbid Mutasi Aset mempunyai tugas Melakukan penatusahaan baran milik daerah serta melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan.

3) Subbid Pemanfaatan /Pemberdayaan Aset

Ringkasan Tugas Subbid Pemanfaatan /Pemberdayaan Aset

Subbid Pemanfaatan/ Pemberdayaan Aset mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penyimpanan, perawatan, pemanfaatan, pemindahan barang milik daerah.

7. BIDANG PERBENDAHARAAN

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Perbendaharaan

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas Mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi Belanja dan pembiayaan serta pengelolaan Kas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;

- c. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Perbendaharaan; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Subbid Pengelolaan Kas Daerah

Ringkasan Tugas Subbid Pengelolaan Kas Daerah

Subbid Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas Meneliti dokumen atau penerimaan uang daerah dan penatausahaan transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah, menyusun anggaran kas, Menyiapkan SPD, Mengevaluasi Pertanggungjawaban pendapatan /penerimaan kas.

2) Subbid Belanja Langsung

Ringkasan Tugas Subbid Belanja Langsung

Subbid Belanja Langsung mempunyai tugas Melaksanakan Registrasi atas SPM dan SP2D belanja Langsung, Meneliti dan memberi pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Non Gaji Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM belanja langsung.

3) Subbid Belanja Tidak Langsung

Ringkasan Tugas Subbid Belanja Tidak Langsung

Subbid Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas Meneliti dan memberi pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan gaji, melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga, meneliti kelengkapan dokumen dan menerbitkan Surat keterangan pemberhentian Pembayaran, Melaksanakan registrasi atas SPM dan SP2D Belanja tidak langsung OPD, meneliti dokumen SPM belanja Tidak Langsung.

8. BIDANG AKUNTANSI

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Akuntansi

- (1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas Mengendalikan dan mengkoordinasikan meliputi evaluasi dan pelaporan keuangan serta kebijakna akuntansi dan neraca daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan Prosedur Penatausahaan keuangan Daerah;
 - b. penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pelaksanaan Pembinaan Teknis Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan laporan keuangan; dan/ atau
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1. Subbid Akuntansi Pendapatan & Belanja

Ringkasan Tugas Subbid Akuntansi Pendapatan & Belanja

Subbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional, melakukan rasionalisasi laporan pertanggungjawaban fungsional, menyipkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD, Menyusun Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup tentang penjabaran Pertanggungjawaban APBD serta menyiapkan bahan penyusunan neraca.

2. Subbid Monev & Pelaporan

Ringkasan Tugas Subbid Monev & Pelaporan

Subbid Monev dan pelaporan mempunyai tugas Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional Dinas badan kantor dan rekonsiliasi, Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada Badan, dinas kantor, menyiapkan bahan dan penyusunan Laporan semesteran dan Prognosis,

Melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan BUMD dan BLUD Melaksanakan pengelolaan penyertaan Modal Pemda, menyelesaikan Permasalahan TPTGR dan barang milik daerah, menyiapkan Laporan realisasi Anggaran Neraca, laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih Laporan Arus kas dan laporan lainnya.

3. Subbid Pembinaan Keuangan Daerah

Ringkasan Tugas Subbid Pembinaan Keuangan Daerah

Subbid Pembinaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah, Melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset hampir sama dengan OPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, eselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

Tabel 2.11

KOMPOSISI PNS BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2020

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	7 orang
2	III	32 orang
3	II	4 orang
4	I	-
	Jumlah	43 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) BPKD Tahun 2020

Komposisi pejabat *esselonering* di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing.

Tabel 2.12
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN ESSELONERING

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	7
3	Eselon IV	21
	Jumlah	29 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) BPKD Tahun 2020

Tabel. 2.13
Daftar Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman

NO	NAMA	NIP	GOL	ESELON	JABATAN	PDDK
1	Drs. ARMEYN RKT, M.Si	19681111 199203 1 006	IV/b	II	Plt. Kepala BPKD	S2
2	MASRI, S.ST,MM	19691122 199403 1 004	IV/a	III.a	Sekretaris BPKD	S2
3	M. NASIR, SE. Akt. M.Si	19770329 200804 1 001	III/d	IV.a	Kabid. Akuntansi	S2
4	NOFRIYANTI, SP.M.Si	19811124 200803 2 001	IV/a	III.b	Kabid. Pendataan	S2
5	YONDRI LOEIS, ST.M.Si	19770128 200312 1 001	IV/a	III.b	Kabid. Penagihan	S2
6	ANTON SAPUTRA,ST,M.Si	19751028 200501 1 011	IV/a	III.b	Kabid. Anggaran	S2
7	DIAN YUHENDRI, ST.M.Eng	19800526 200902 1 001	III/c	III.b	Kabid. Aset	S2
8	RINI ANGGRAINI, SE, Ak.	19771028 200902 2 001	III/c	III.b	Kabid. Perbendaharaan	S1
9	NELFA SUSILAWATI, SE.MM	19731017 200604 2 010	III/d	IV.a	Kasubag Umum &Kepegawaian	S2
10	HENI EMALIA YULISTINA, SE.M.SI	19840522 201001 2 003	III/b	IV.a	Kasubag Perencanaan, Evaluasi & Laporan	S2
11	SURYA ANGGRAINI, SE	19850909 200902 2 003	III/c	IV.a	Kasubag Keuangan	S1
12	VIVIAN RUBIANTI, SE	19810508 201001 2 016	III/c	IV.a	Kasubbid. Monev & Pelaporan Pendapatan	S1
13	ELSA NOFRIYANTI, S.T	19841118 200902 2 007	III/c	IV.a	Kasubbid. Pajak Daerah	S1
14	NOVRI MARTA DINATA, S.STP	19790506 200902 1 004	III/b	IV.a	Kasubbid. Pendataan	S1
15	RIVANDI ARIFIN, S.Sos	19710104 199303 1 002	III/d	IV.a	Kasubid. Penetapan	S1
16	FREDDY RISKA, ST	19790912 201101 1 008	III/c	IV.a	Kasubbid. Penagihan PBB & BPHTB	S1
17	MARTINIS	19660822 198603 2 004	III/c	IV.a	Kasubbid. Pendapatan Lainnya	SMA

NO	NAMA	NIP	GOL	ESELON	JABATAN	PDDK
18	EVI NOVIA, SE	19760525 200604 2 015	III/d	IV.a	Kasubbid. SKPKD	S1
19	BOY ERVANTOS, SE	19860903 200801 1 002	III/b	IV.a	Kasubbid.Pengendalian Anggaran	S1
20	FAJIR MUHAMMAD SAWKY, S.STP	19920705 201507 1 001	III/b	IV.a	Kasubbid Perencanaan Anggaran	S1
21	DELFA, SE	19840417 201503 2 004	III/b	IV.a	Kasubbid. Administrasi Aset	S1
22	EDWARITA, SE	19691202 200501 2 005	III/d	IV.a	Kasubbid. Pemanfaatan/ Pemberdayaan Aset	S1
23	PURNA IRWAN,ST	19780608 201310 1 001	III/c	IV.a	Kasubbid. Mutasi Aset	S1
24	ASNELLIY, Amd	19660915 199308 2 001	III/d	IV.a	Kasubbid. Belanja Tidak Langsung	D3
25	RONI ABDILLAH, SE	19840415 201001 1 029	III/c	IV.a	Kasubbid. Pengelola Kas Daerah	S1
26	YURI SANDRITA, SE	19850508 201001 2 034	III/c	IV.a	Kasubbid. Belanja Langsung	S1
27	YESSI PERMATA SARI, SE. MM	19840705 201001 2 031	III/c	IV.a	Kasubbid. Monev & Pelaporan	S2
28	HERLINA TRICIA, SE	19830830 201001 2 016	III/c	IV.a	Kasubid. Akuntansi Pendapatan & Belanja	S1
29	FITRAWATI	19690811 199001 2 001	III/d	IV.a	Kasubid. Pembinaan Keuangan Daerah	SMA
30	IMELDA	19690811 199001 2 001	II /b		Fungsional Umum	SMA
31	ELIANORA, SE	19701008 200406 2 003	III/a		Fungsional Umum	S1
32	YESSI MAISALFIA	19780502 201001 2 002	II/c		Fungsional Umum	SMA
33	LIYANE, Amd	19800723 201101 2 004	III/a		Fungsional Umum	D3
34	SAPRIL, SE	19760420 201001 1 012	III/a		Fungsional Umum	S1
35	WASNITA S.Sos.MM	19690115 198903 2 003	IV/a		Fungsional Umum	S2
36	MURTA MURNI, SE	19800709 201001 2 022	III/a		Fungsional Umum	S1
37	ROVITA KASTRY ROZA, SE	19931117 201903 2 001	III/a		Analisi Keuangan	S1
38	WINDA TRIMADANI, Amd	19920308 201903 2 003	II/c		Pengelola Data Keuangan	D3
39	HARLINA, SE.MM	19660425 198602 2 003	IV/a		Kasi Verifikasi DPPKA kab. Padang Pariaman	S2
40	MURNIALIS, Amd	19640403 199203 2 004	III/d		Kasubbid. Penanaman modal	D3
41	MARZAINI Amd	19800331 201001 1 013	III/a		Fungsional Umum	D3
42	YULFENDRI, SE	19670730 200801 1 002	III/b		Fungsional Umum	S1
43	LENY MARDIATY	19710320 199003 2 001	II/d		Fungsional Umum	SMA

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD (Renstra OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD (RENJA OPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya rencana Kerja BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 disusun dengan mempedomani :

1. RPJPN tahun 2005 – 2025,
2. RPJMN 2014,
3. RPJPD Propinsi Sumbar 2005 – 2025,
4. RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005 – 2025,
5. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 -2021,

Tabel 2. 14
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Padang Pariaman

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Padang Pariaman

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BPKD	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 2. Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi, 3. Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi, 4. Persentase meningkatnya kualitas SDM aparatur BPKD.	1. 10 Dokumen, 2. 98,00%, 3. 98,50, 4. 97,50%	11,432,709,964.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BPKD	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 2. Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi, 3. Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi, 4. Persentase meningkatnya kualitas SDM aparatur BPKD.	1. 10 Dokumen, 2. 98,00%, 3. 98,50, 4. 97,50%	11,432,709,964.00	
5 02 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKD	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang difasilitasi	100%	100,048,750.00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKD	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang difasilitasi	100%	100,048,750.00	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	BPKD	Jumlah Rencana Kerja (Renja, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), SK IKU, Rencana Aksi, Dokumen Anggaran (RKA & DPA Awal, RKA dan DPA Perubahan, Anggaran Kas) yang disusun	10 dokumen	50,000,000.00	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	BPKD	Jumlah Rencana Kerja (Renja, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), SK IKU, Rencana Aksi, Dokumen Anggaran (RKA & DPA Awal, RKA dan DPA Perubahan, Anggaran Kas) yang disusun	10 dokumen	50,000,000.00	
5 02 01 2.01 03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	BPKD	Jumlah dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5 dokumen	50,048,750.00	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	BPKD	Jumlah dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5 dokumen	50,048,750.00	
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan	BPKD	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	9,557,000,000.00	Administrasi Keuangan	BPKD	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	9,557,000,000.00	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKD	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	45 ASN	9,500,000,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKD	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	45 ASN	9,500,000,000.00	
5 02 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD	Jumlah Laporan yang disusun (LAKIP, LPPD, EKPPD, LKPJ), Laporan	6 dokumen	57,000,000.00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD	Jumlah Laporan yang disusun (LAKIP, LPPD, EKPPD, LKPJ), Laporan	6 dokumen	57,000,000.00	

			Realisasi fisik dan keuangan per bulan), Capaian IKU, Capaian Renstra yang disusun					Realisasi fisik dan keuangan per bulan), Capaian IKU, Capaian Renstra yang disusun		
5 02 01 2.03	Administrasi Umum	BPKD	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	98.00%	1,675,661,214.00	Administrasi Umum	BPKD	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	98.00%	1,675,661,214.00
5 02 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKD	Jumlah surat yang distribusikan tepat waktu	1 tahun	210,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKD	Jumlah surat yang distribusikan tepat waktu	1 tahun	210,000,000.00
5 02 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKD	Jumlah tagihan yang dibayar tepat waktu	1 tahun	206,574,873.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKD	Jumlah tagihan yang dibayar tepat waktu	1 tahun	206,574,873.00
5 02 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan pajak kendaraan bermotor	1 tahun	18,872,250.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan pajak kendaraan bermotor	1 tahun	18,872,250.00
5 02 01 2.03 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Anggaran untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan.	1 tahun	350,000,000.00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Anggaran untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan.	1 tahun	350,000,000.00
5 02 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		a. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Bahan kebersihan b. Jumlah Gedung yg memperoleh penyediaan jasa kebersihan bangunan	1 tahun	96,001,841.00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		a. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Bahan kebersihan b. Jumlah Gedung yg memperoleh penyediaan jasa kebersihan bangunan	1 tahun	96,001,841.00
5 02 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BPKD	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	60,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BPKD	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	60,000,000.00
5 02 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPKD	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10 eksemplar	20,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPKD	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10 eksemplar	20,000,000.00
5 02 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPKD	a. Jumlah waktu terlaksananya penyediaan makan dan minum tamu b. jumlah waktu terlaksananya penyediaan makan minum rapat	1 tahun	40,000,000.00	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPKD	a. Jumlah waktu terlaksananya penyediaan makan dan minum tamu b. jumlah waktu terlaksananya penyediaan makan minum rapat	1 tahun	40,000,000.00
5 02 01 2.03 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	BPKD	Jumlah waktu tersedianya anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	1 tahun	183,643,750.00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	BPKD	Jumlah waktu tersedianya anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	1 tahun	183,643,750.00
5 02 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	Jumlah pengadaan kendaraan kendaraan dinas/operasional	1 unit	0.00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	Jumlah pengadaan kendaraan kendaraan dinas/operasional	1 unit	0.00
5 02 01 2.03 24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPKD	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	20 unit	125,000,000.00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPKD	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	20 unit	125,000,000.00
5 02 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPKD	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	10 unit	150,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPKD	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	10 unit	150,000,000.00
5 02 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	a. Jumlah mobil memperoleh jasa service b. Jumlah mobil yg	14 kendaraan	140,568,500.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	a. Jumlah mobil memperoleh jasa service b. Jumlah mobil yg	14 kendaraan	140,568,500.00

					memperoleh suku cadang c. Jumlah mobil yg memperoleh penyediaan bahan bakar					memperoleh suku cadang c. Jumlah mobil yg memperoleh penyediaan bahan bakar				
5	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BPKD	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	10 unit	75,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BPKD	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	10 unit	75,000,000.00
5	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPKD	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100.00%	100,000,000.00	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPKD	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100.00%	100,000,000.00
5	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BPKD	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan	70 orang	100,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BPKD	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan	70 orang	100,000,000.00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKD	1. Perencanaan Anggaran Tepat Waktu , 2. Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat, 3. Persentase kualitas laporan keuangan daerah	1. 30 Nov 2021, 2. 100%, 3. 100%	2,555,724,007.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKD	1. Perencanaan Anggaran Tepat Waktu , 2. Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat, 3. Persentase kualitas laporan keuangan daerah	1. 30 Nov 2021, 2. 100%, 3. 100%	2,555,724,007.00
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKD	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan anggaran daerah	186 dokumen	998,306,250.00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKD	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan anggaran daerah	186 dokumen	998,306,250.00
5	02	02	2.01	01	Penyusunan KUA dan PPAS	BPKD	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	98,000,000.00	Penyusunan KUA dan PPAS	BPKD	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	98,000,000.00
5	02	02	2.01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS setelah perubahan	2 dokumen	98,000,000.00	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS setelah perubahan	2 dokumen	98,000,000.00
5	02	02	2.01	03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	BPKD	Jumlah dokumen review RKA SKPD/perubahan RKA SKPD	88 dokumen	20,500,000.00	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	BPKD	Jumlah dokumen review RKA SKPD/perubahan RKA SKPD	88 dokumen	20,500,000.00
5	02	02	2.01	04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	BPKD	Jumlah dokumen review RKA SKPD/perubahan RKA SKPD	88 dokumen	29,417,000.00	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	BPKD	Jumlah dokumen review RKA SKPD/perubahan RKA SKPD	88 dokumen	29,417,000.00
5	02	02	2.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	BPKD	1. Jumlah Penyusunan Ranperda tentang APBD, 2. Jumlah rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen	500,000,000.00	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	BPKD	1. Jumlah Penyusunan Ranperda tentang APBD, 2. Jumlah rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen	500,000,000.00
5	02	02	2.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	BPKD	1. Jumlah Penyusunan Ranperda Perubahan APBD, 2. Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen	150,000,000.00	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	BPKD	1. Jumlah Penyusunan Ranperda Perubahan APBD, 2. Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen	150,000,000.00
5	02	02	2.01	07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	BPKD	Jumlah dokumen peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD	1 dokumen	48,036,250.00	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	BPKD	Jumlah dokumen peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD	1 dokumen	48,036,250.00
5	02	02	2.01	08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	BPKD	Jumlah dokumen regulasi bidang anggaran	1 dokumen	54,353,000.00	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	BPKD	Jumlah dokumen regulasi bidang anggaran	1 dokumen	54,353,000.00

5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKD	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan	10972 dokumen	724,500,000.00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKD	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan	10972 dokumen	724,500,000.00
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKD	Jumlah data rekonsiliasi kas daerah	12 kali	75,500,000.00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKD	Jumlah data rekonsiliasi kas daerah	12 kali	75,500,000.00
5	02	02	2.02	02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKD	Jumlah dokumen perintah pencairan dana belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan PNSD, gaji dan tunjangan ketua dan anggota DPRD, alokasi dana desa dan dana nagari, hibah dan bantuan keuangan, pengembalian belanja, non anggaran, insentif)	3000 dokumen	60,000,000.00	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKD	Jumlah dokumen perintah pencairan dana belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan PNSD, gaji dan tunjangan ketua dan anggota DPRD, alokasi dana desa dan dana nagari, hibah dan bantuan keuangan, pengembalian belanja, non anggaran, insentif)	3000 dokumen	60,000,000.00
5	02	02	2.02	03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKD	1. Jumlah Laporan Realisasi Dana DAK Fisik, 2. Jumlah Laporan Realisasi DAK Non Fisik, 3. Jumlah Laporan Realisasi DID, 4. Jumlah Laporan Realisasi DBH, 5. Jumlah Laporan Realisasi Dana Desa, 6. Jumlah Laporan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	120,000,000.00	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKD	1. Jumlah Laporan Realisasi Dana DAK Fisik, 2. Jumlah Laporan Realisasi DAK Non Fisik, 3. Jumlah Laporan Realisasi DID, 4. Jumlah Laporan Realisasi DBH, 5. Jumlah Laporan Realisasi Dana Desa, 6. Jumlah Laporan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	120,000,000.00
5	02	02	2.02	04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	BPKD	Jumlah Dokumen Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung (SP2D UP, SP2D TU, SP2D GU, SP2D GU dan TU Nihil, SP2D LS)	4000 dokumen	49,000,000.00	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	BPKD	Jumlah Dokumen Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung (SP2D UP, SP2D TU, SP2D GU, SP2D GU dan TU Nihil, SP2D LS)	4000 dokumen	49,000,000.00
5	02	02	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	BPKD	1. Jumlah Laporan Realisasi Data Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD, 2. Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil 3. Jumlah Data Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNSD, 4. Jumlah Data Rekonsiliasi Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil, 5. Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, 6. Jumlah Satuan Kerja (Bendahara) Bimbingan Aplikasi Simgaji, 7. Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan PNSD, 8.	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen, 8. 1.800 Dokumen, 9. 300 Dokumen	220,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	BPKD	1. Jumlah Laporan Realisasi Data Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD, 2. Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil 3. Jumlah Data Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNSD, 4. Jumlah Data Rekonsiliasi Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil, 5. Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, 6. Jumlah Satuan Kerja (Bendahara) Bimbingan Aplikasi Simgaji, 7. Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan PNSD, 8.	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen, 8. 1.800 Dokumen, 9. 300 Dokumen	220,000,000.00

					Jumlah SP2B Dana BOS, 9. Jumlah SP2B Dana BLUD				Jumlah SP2B Dana BOS, 9. Jumlah SP2B Dana BLUD					
5	02	02	2.02	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKD	1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP 8 %, 2. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP dan Askes Subsidi, 3. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP Taperrum, 4. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran JKK dan JKM, 5. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP 8%, JKK dan JKM, 6. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP dan Askes Subsidi, 7. Jumlah Data Rekonsiliasi Taperrum	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 12 Dokumen, 5. 6 Dokumen, 6. 8 Dokumen, 7. 1 Dokumen	55,000,000.00	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKD	1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP 8 %, 2. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP dan Askes Subsidi, 3. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP Taperrum, 4. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran JKK dan JKM, 5. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP 8%, JKK dan JKM, 6. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP dan Askes Subsidi, 7. Jumlah Data Rekonsiliasi Taperrum	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 12 Dokumen, 5. 6 Dokumen, 6. 8 Dokumen, 7. 1 Dokumen	55,000,000.00
5	02	02	2.02	07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	BPKD	Jumlah pelaksanaan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah	25 kali	50,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	BPKD	Jumlah pelaksanaan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah	25 kali	50,000,000.00
5	02	02	2.02	08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	BPKD	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas	12 kali	40,000,000.00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	BPKD	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas	12 kali	40,000,000.00
5	02	02	2.02	09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	BPKD	Jumlah pelaksanaan dokumen penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan	10 dokumen	25,000,000.00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	BPKD	Jumlah pelaksanaan dokumen penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan	10 dokumen	25,000,000.00
5	02	02	2.02	10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKD	Jumlah SPD yang direalisasikan	4 kali	30,000,000.00	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKD	Jumlah SPD yang direalisasikan	4 kali	30,000,000.00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKD	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen%	739,205,257.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKD	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen%	739,205,257.00
5	02	02	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	BPKD	1. Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 2. Jumlah Peraturan KDH	1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen	110,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	BPKD	1. Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 2. Jumlah Peraturan KDH	1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen	110,000,000.00

5	02	02	2.03	05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	BPKD	1. Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, 2. Jumlah laporan keuangan yang tersusun, 3. Jumlah Laporan Keuangan SKPKD	1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen, 3. 1 dokumen	250,000,000.00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	BPKD	1. Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, 2. Jumlah laporan keuangan yang tersusun, 3. Jumlah Laporan Keuangan SKPKD	1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen, 3. 1 dokumen	250,000,000.00
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKD	Jumlah dokumen tanggapan penyimpangan pada objek pemeriksaan	1 dokumen	190,000,000.00	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKD	Jumlah dokumen tanggapan penyimpangan pada objek pemeriksaan	1 dokumen	190,000,000.00
5	02	02	2.03	07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	BPKD	Jumlah OPD yang memiliki data pendapatan, belanja dan pembiayaan yang direkon	44 OPD	15,000,000.00	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	BPKD	Jumlah OPD yang memiliki data pendapatan, belanja dan pembiayaan yang direkon	44 OPD	15,000,000.00
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKD	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	1 dokumen	90,000,000.00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKD	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	1 dokumen	90,000,000.00
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKD	Jumlah dokumen penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	1 dokumen	19,205,257.00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKD	Jumlah dokumen penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	1 dokumen	19,205,257.00
5	02	02	2.03	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKD	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah	44 OPD	65,000,000.00	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKD	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah	44 OPD	65,000,000.00
5	02	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan	BPKD	Jumlah dokumen dana hibah dan bansos dan bantuan keuangan khusus yang tersalurkan	14 dokumen	93,712,500.00	Kegiatan Penunjang Urusan	BPKD	Jumlah dokumen dana hibah dan bansos dan bantuan keuangan khusus yang tersalurkan	14 dokumen	93,712,500.00
5	02	02	2.04	01	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah	BPKD	Jumlah dokumen pinjaman pemerintah daerah	2 dokumen	45,000,000.00	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah	BPKD	Jumlah dokumen pinjaman pemerintah daerah	2 dokumen	45,000,000.00
5	02	02	2.04	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	BPKD	Jumlah terlaksananya alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus	12 kali	48,712,500.00	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	BPKD	Jumlah terlaksananya alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus	12 kali	48,712,500.00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKD	1. Persentase BMD yang tercatat dengan akurat, 2. Persentase	1. 100%, 2. 100%, 3. 61%	575,000,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKD	1. Persentase BMD yang tercatat dengan akurat, 2. Persentase	1. 100%, 2. 100%, 3. 61%	575,000,000.00

				BMD yang termanfaatkan dengan tepat, 3. Persentase BMD yang tertib						BMD yang termanfaatkan dengan tepat, 3. Persentase BMD yang tertib				
5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	575,000,000.00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	575,000,000.00	
5	02	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKD	Persentase rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai aturan	70%	25,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKD	Persentase rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai aturan	70%	25,000,000.00
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKD	Persentase penatausahaan barang milik daerah	80%	100,000,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKD	Persentase penatausahaan barang milik daerah	80%	100,000,000.00
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKD	Persentase barang yang terinventarisir	70%	75,000,000.00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKD	Persentase barang yang terinventarisir	70%	75,000,000.00
5	02	03	2.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah OPD pelaksanaan pengamanan fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	44 OPD	75,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah OPD pelaksanaan pengamanan fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	44 OPD	75,000,000.00
5	02	03	2.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah dokumen Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 dokumen	100,000,000.00	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah dokumen Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 dokumen	100,000,000.00
5	02	03	2.01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah OPD yang melaksanakan rekon penyusunan laporan barang milik daerah	44 OPD	30,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah OPD yang melaksanakan rekon penyusunan laporan barang milik daerah	44 OPD	30,000,000.00
5	02	03	2.01	12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	BPKD	Jumlah laporan barang milik daerah OPD	44 dokumen	120,000,000.00	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	BPKD	Jumlah laporan barang milik daerah OPD	44 dokumen	120,000,000.00
5	02	03	2.01	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah	44 OPD	50,000,000.00	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah	44 OPD	50,000,000.00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKD	1. Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD, 2. Persentase Pencapaian Target PAD	1. 95%, 2. 94%	1,303,000,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKD	1. Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD, 2. Persentase Pencapaian Target PAD	1. 95%, 2. 94%	1,303,000,000.00
5	02	04	2.02		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	BPKD	1. Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak, 2. Persentase Penerimaan PAD	1. 1 dokumen, 2. 100%,	1,303,000,000.00	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	BPKD	1. Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak, 2. Persentase Penerimaan PAD	1. 1 dokumen, 2. 100%,	1,303,000,000.00
5	02	04	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	BPKD	Jumlah penerbitan SPPT dan DHKP	180000 lembar SPPT dan 600 buku DHKP	70,000,000.00	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	BPKD	Jumlah penerbitan SPPT dan DHKP	180000 lembar SPPT dan 600 buku DHKP	70,000,000.00
5	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKD	Jumlah dokumen objek pajak	1 dokumen	100,000,000.00	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKD	Jumlah dokumen objek pajak	1 dokumen	100,000,000.00

5	02	04	2.02	03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKD	Jumlah dan daftar objek pajak yang terdata	20%	125,000,000.00	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKD	Jumlah dan daftar objek pajak yang terdata	20%	125,000,000.00					
5	02	04	2.02	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKD	Jumlah regulasi dan kebijakan tentang pajak daerah yang diterbitkan	2 dokumen	15,000,000.00	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKD	Jumlah regulasi dan kebijakan tentang pajak daerah yang diterbitkan	2 dokumen	15,000,000.00					
5	02	04	2.02	05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	BPKD	Jumlah Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan	17 kali	83,000,000.00	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	BPKD	Jumlah Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan	17 kali	83,000,000.00					
5	02	04	2.02	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	BPKD	Jumlah aplikasi pajak daerah online	3 aplikasi	150,000,000.00	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	BPKD	Jumlah aplikasi pajak daerah online	3 aplikasi	150,000,000.00					
5	02	04	2.02	07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	BPKD	Jumlah kegiatan sosialisasi cukai tembakau	1 kali	100,000,000.00	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	BPKD	Jumlah kegiatan sosialisasi cukai tembakau	1 kali	100,000,000.00					
5	02	04	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKD	Persentase data pajak yang diinput ke sistem online pajak daerah	100%	100,000,000.00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKD	Persentase data pajak yang diinput ke sistem online pajak daerah	100%	100,000,000.00					
5	02	04	2.02	09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKD	Jumlah data pajak yang dimutakhirkan dan diinventarisir	1 dokumen	100,000,000.00	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKD	Jumlah data pajak yang dimutakhirkan dan diinventarisir	1 dokumen	100,000,000.00					
5	02	04	2.02	10	Pemeriksaan Pajak Daerah	BPKD	Persentase data objek pajak yang valid	100%	60,000,000.00	Pemeriksaan Pajak Daerah	BPKD	Persentase data objek pajak yang valid	100%	60,000,000.00					
5	02	04	2.02	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKD	1.Persentase Data Objek Pajak dan retribusi yang Valid, 2. Persentase Piutang PBB yang Teridentifikasi	1. 100 %, 2. 20%	400,000,000.00	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKD	1.Persentase Data Objek Pajak dan retribusi yang Valid, 2. Persentase Piutang PBB yang Teridentifikasi	1. 100 %, 2. 20%	400,000,000.00					
J U M L A H									15,866,433,971.00	J U M L A H									15,866,433,971.00

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2016 – 2021, maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai:

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional
2. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energy terbarukan biomas.
3. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
4. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2016-2021 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:

1. pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;
2. penyediaan infrastruktur wilayah;
3. peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Dalam penyusunan Renja BPKD Tahun telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun

kegiatan dalam renja BPKD Tahun apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1
Matrik Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMN 2014-2020
dengan Visi dan Misi Padang Pariaman Tahun 2016-2021

Visi Misi RPJMN Tahun 2014-2020		Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021		Visi Misi RPJMD Kab. Padang Pariaman Tahun 2016-2021	
Visi :		Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera		Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang baru, religius, cerdas dan sejahtera	
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1	Meningkatnya tata kehidupan yang harmonis, agaman, beradab, dan budaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,	1	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan Falsafah Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2	Meningkatkan tata pemerintah yang baik, bersih, dan profesional,	2	Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	3	meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkeadilan, dan berkualitas tinggi,	3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan kesehatan, sarana prasarana kualitas tenaga pendidik
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	4	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan budaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	4	Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	5	Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.			6	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan Publik
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.			7	Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana

TABEL 3.2
KETERKAITAN ANTARA VISI DAN MISI RPJMN 2014-2020
DENGAN VISI MISI PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021

VISI RPJMN TAHUN 2014-2020		VISI MISI RPJPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2005-2025	
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong		Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas	
MISI RPJMN TAHUN 2014-2020		MISI RPJPD TAHUN 2005-2025	
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasis nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.		

TABEL 3.3
Persandingan Tema RKP, RKPDP Provinsi Sumbar dan
RKPDP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

Tema RKP tahun 2021	Tema RKPDP Provinsi Sumbar tahun 2021	Tema RKPDP Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021
Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial	Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial untuk sumberdaya manusia berkualitas	Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan pemerataan infrastruktur dan peningkatan SDM yang berkualitas

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Rencana Kerja (Renja) BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 tidak lepas dari pencapaian tujuan BPKD Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKD Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 yakni **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel”**.

Sedangkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 karena tahun merupakan tahun terakhir dari periode pelaksanaan RPJMD (Tahun 2016-2021) sesuai dengan pentahapan dalam RPJPD Kab Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada Pepres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2016-2021. Untuk itu sejalan dengan itu sebagaimana yang dituangkan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021, maka prioritas pembangunan adalah:

1. *Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan* dengan arah kebijakan melalui peningkatan jumlah kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. peningkatan, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan, meningkatnya populasi ternak, peningkatan kawasan konservasi dan budidaya perikanan, pembinaan dan peningkatan teknologi pertanian serta peningkatan kapasitas penyuluh
2. *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Iptek* dengan arah kebijakan melalui peningkatan kualifikasi guru, pengembangan pendidik non formal, meningkatnya akses pendidikan dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan, meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
3. *Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* dengan arah kebijakan melalui pengembangan diklat aparatur, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas laporan keuangan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan, peningkatan kualitas musrenbang, fasilitasi dan sinkronisasi antara perencanaan

pembangunan dengan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah.

4. *Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha serta pengembangan pariwisata Daerah secara terpadu* dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan investasi dan kejelasan regulasi, peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, menata dan mengelola kawasan wisata kuliner serta menata dan mengelola kawasan wisata religi.
5. *Peningkatan Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat* dengan arah kebijakan melalui peningkatan wirid dan pengajian, meningkatkan insentif guru TPA/MDA, gharin, imam dan khatib, meningkatkan kapasitas lembaga adat dan budaya.
6. *Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pelaku UMKM dan Koperasi* dengan arah kebijakan melalui pengembangan produk olahan dan pemasaran bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan koperasi,
7. *Penurunan Tingkat Kemiskinan secara terintegrasi* dengan arah kebijakan melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, anak jalanan, anak terlantar, mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. meningkatnya sarana dan prasarana pada daerah tertinggal dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin serta penanganan kemiskinan secara terpadu antar OPD.
8. *Peningkatan Pembangunan berbasis mitigasi bencana* dengan arah kebijakan melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan

ruang sesuai dengan fungsi kawasan, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pencegahan bahaya kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam

9. *Peningkatan pembangunan Infrastruktur penunjang ekonomi yang ramah Lingkungan* dengan arah kebijakan melalui pembangunan kantor pemerintahan di kawasan ibukota kabupaten, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas dan pemeliharaan prasarana perhubungan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah, peningkatan pembangunan dan pengelolaan irigasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk penunjang ekonomi masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKD dan untuk menyusun perencanaan dalam Renja BPKD tahun 2021 sesuai dengan prioritas yang ke tiga yaitu *Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* maka tujuan dan Sasaran Rencana BPKD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Matrik Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	0
		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Pengelolaan BMD	0
		Meningkatnya Pajak Daerah	Presentase Kenaikan Pajak Daerah	10,02%

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan aparatur
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
3. Memberikan pelayanan yang Prima terhadap OPD-OPD.
4. Mengotimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi
5. Mewujudkan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan
6. Meningkatkan pendapatan asli daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, pada tahun 2021 BPKD menyelenggarakan 1 (Satu) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, yaitu Urusan Keuangan. Sesuai Permendagri 90 tahun 2019 pada tahun 2021 BPKD melaksanakan 4 (Empat) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 65 (Enam puluh lima) sub kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp 15.866.433.971,00.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah, Secara umum, program dan kegiatan BPKD Tahun 2021 adalah sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun dan Prakiraan Maju Tahun berikut :

Tabel 3.5

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : KEUANGAN (FUNGSI PENUNJANG)
OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA				15,866,433,971.00				17,453,077,368.10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5 02	KEUANGAN								
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 2. Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi, 3. Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi, 4. Persentase meningkatnya kualitas SDM aparatur BPKD.	BPKD	1. 10 Dokumen, 2. 98,00%, 3. 98,50, 4. 97,50%	11,432,709,964.00	APBD		1. 10 Dokumen, 2. 98,50%, 3. 98,80, 4. 98,00%	12,575,980,960.40
5 02 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang difasilitasi	BPKD	100%	100,048,750.00	APBD		100%	110,053,625.00
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kerja (Renja, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), SK IKU, Rencana Aksi, Dokumen Anggaran (RKA & DPA Awal, RKA dan DPA Perubahan, Anggaran Kas) yang disusun	BPKD	10 dokumen	50,000,000.00	APBD		10 dokumen	55,000,000.00
5 02 01 2.01 03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BPKD	5 dokumen	50,048,750.00	APBD		5 dokumen	55,053,625.00

5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	BPKD	100%	9,557,000,000.00	APBD		100%	10,512,700,000.00
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	BPKD	45 ASN	9,500,000,000.00	APBD		45 ASN	10,450,000,000.00
5	02	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun (LAKIP, LPPD, EKPPD, LKPJ, Laporan Realisasi fisik dan keuangan per bulan), Capaian IKU, Capaian Renstra yang disusun	BPKD	6 dokumen	57,000,000.00	APBD		6 dokumen	62,700,000.00
5	02	01	2.03		Administrasi Umum	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	BPKD	98.00%	1,675,661,214.00	APBD		98.00%	1,843,227,335.40
5	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang distribusikan tepat waktu	BPKD	1 tahun	210,000,000.00	APBD		1 tahun	231,000,000.00
5	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan yang dibayar tepat waktu	BPKD	1 tahun	206,574,873.00	APBD		1 tahun	227,232,360.30
5	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan pajak kendaraan bermotor	BPKD	1 tahun	18,872,250.00	APBD		1 tahun	20,759,475.00
5	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Anggaran untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan.	BPKD	1 tahun	350,000,000.00	APBD		1 tahun	385,000,000.00
5	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	a. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Bahan kebersihan b. Jumlah Gedung yg memperoleh penyediaan jasa kebersihan bangunan	BPKD	1 tahun	96,001,841.00	APBD		1 tahun	105,602,025.10
5	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKD	1 tahun	60,000,000.00	APBD		1 tahun	66,000,000.00
5	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	BPKD	10 eksemplar	20,000,000.00	APBD		10 eksemplar	22,000,000.00
5	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	a. Jumlah waktu terlaksananya penyediaan makan dan minum tamu b. jumlah waktu terlaksananya penyediaan makan minum rapat	BPKD	1 tahun	40,000,000.00	APBD		1 tahun	44,000,000.00
5	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu tersedianya anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	BPKD	1 tahun	183,643,750.00	APBD		1 tahun	202,008,125.00
5	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	BPKD	1 unit	0.00	APBD		1 unit	-
5	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	BPKD	20 unit	125,000,000.00	APBD		20 unit	137,500,000.00
5	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	BPKD	10 unit	150,000,000.00	APBD		10 unit	165,000,000.00
5	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	a. Jumlah mobil memperoleh jasa service b. Jumlah mobil yg memperoleh suku cadang c. Jumlah mobil yg memperoleh penyediaan bahan bakar	BPKD	14 kendaraan	140,568,500.00	APBD		14 kendaraan	154,625,350.00
5	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	BPKD	10 unit	75,000,000.00	APBD		10 unit	82,500,000.00
5	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	BPKD	100.00%	100,000,000.00	APBD		100.00%	110,000,000.00
5	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan	BPKD	70 orang	100,000,000.00	APBD		70 orang	110,000,000.00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Perencanaan Anggaran Tepat Waktu , 2. Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat, 3. Persentase kualitas laporan keuangan daerah	BPKD	1. 30 Nov 2021, 2. 100%, 3. 100%	2,555,724,007.00	APBD		1. 30 Nov 2022, 2. 100%, 3. 100%	2,811,296,407.70

5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan anggaran daerah	BPKD	186 dokumen	998,306,250.00	APBD		198 dokumen	1,098,136,875.00
5	02	02	2.01	01	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	BPKD	2 dokumen	98,000,000.00	APBD	2 dokumen	107,800,000.00
5	02	02	2.01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS setelah perubahan	BPKD	2 dokumen	98,000,000.00	APBD	2 dokumen	107,800,000.00
5	02	02	2.01	03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen review RKA SKPD/perubahan RKA SKPD	BPKD	88 dokumen	20,500,000.00	APBD	88 dokumen	22,550,000.00
5	02	02	2.01	04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen review RKA SKPD/perubahan RKA SKPD	BPKD	88 dokumen	29,417,000.00	APBD	88 dokumen	32,358,700.00
5	02	02	2.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	1. Jumlah Penyusunan Ranperda tentang APBD, 2. Jumlah rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	BPKD	1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen	500,000,000.00	APBD	1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen	550,000,000.00
5	02	02	2.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	1. Jumlah Penyusunan Ranperda Perubahan APBD, 2. Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	BPKD	1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen	150,000,000.00	APBD	1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen	165,000,000.00
5	02	02	2.01	07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD	BPKD	1 dokumen	48,036,250.00	APBD	1 dokumen	52,839,875.00
5	02	02	2.01	08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi bidang anggaran	BPKD	1 dokumen	54,353,000.00	APBD	1 dokumen	59,788,300.00
5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan	BPKD	10972 dokumen	724,500,000.00	APBD		10972 dokumen	796,950,000.00
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah data rekonsiliasi kas daerah	BPKD	12 kali	75,500,000.00	APBD	12 kali	83,050,000.00
5	02	02	2.02	02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen perintah pencairan dana belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan PNSD, gaji dan tunjangan ketua dan anggota DPRD, alokasi dana desa dan dana nagari, hibah dan bantuan keuangan, pengembalian belanja, non anggaran, insentif)	BPKD	3000 dokumen	60,000,000.00	APBD	3000 dokumen	66,000,000.00
5	02	02	2.02	03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1. Jumlah Laporan Realisasi Dana DAK Fisik, 2. Jumlah Laporan Realisasi DAK Non Fisik, 3. Jumlah Laporan Realisasi DID, 4. Jumlah Laporan Realisasi DBH, 5. Jumlah Laporan Realisasi Dana Desa, 6. Jumlah Laporan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	BPKD	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	120,000,000.00	APBD	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	132,000,000.00
5	02	02	2.02	04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah Dokumen Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung (SP2D UP, SP2D TU, SP2D GU, SP2D GU dan TU Nihil, SP2D LS)	BPKD	4000 dokumen	49,000,000.00	APBD	4000 dokumen	53,900,000.00
5	02	02	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	1. Jumlah Laporan Realisasi Data Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD, 2. Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil 3. Jumlah Data Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNSD, 4. Jumlah Data Rekonsiliasi Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil, 5. Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, 6. Jumlah Satuan Kerja (Bendahara) Bimbingan Aplikasi Simgaji, 7. Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan PNSD, 8. Jumlah	BPKD	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen, 8. 1.800 Dokumen, 9. 300 Dokumen	220,000,000.00	APBD	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen, 8. 1.800 Dokumen, 9. 300 Dokumen	242,000,000.00

						SP2B Dana BOS, 9. Jumlah SP2B Dana BLUD							
5	02	02	2.02	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP 8 %, 2. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP dan Askes Subsidi, 3. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP Taperrum, 4. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran JKK danJKM, 5.Jumlah Data Rekonsiliasi IWP 8%, JKK dan JKJ, 6. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP dan Askes Subsidi , 7. Jumlah Data Rekonsiliasi Taperrum	BPKD	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 12 Dokumen, 5. 6 Dokumen, 6. 8 Dokumen, 7. 1 Dokumen	55,000,000.00	APBD		1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 12 Dokumen, 5. 6 Dokumen, 6. 8 Dokumen, 7. 1 Dokumen	60,500,000.00
5	02	02	2.02	07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah pelaksanaan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah	BPKD	25 kali	50,000,000.00	APBD		25 kali	55,000,000.00
5	02	02	2.02	08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas	BPKD	12 kali	40,000,000.00	APBD		12 kali	44,000,000.00
5	02	02	2.02	09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah pelaksanaan dokumen penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan	BPKD	10 dokumen	25,000,000.00	APBD		10 dokumen	27,500,000.00
5	02	02	2.02	10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD yang direalisasikan	BPKD	4 kali	30,000,000.00	APBD		4 kali	33,000,000.00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKD	1 dokumen%	739,205,257.00	APBD		50 dokumen	813,125,782.70
5	02	02	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 2. Jumlah Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKD	1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen	110,000,000.00	APBD		1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen	121,000,000.00
5	02	02	2.03	05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	1. Jumlah Laporan Keuangan Semesteran, 2. Jumlah laporan keuangan yang tersusun, 3. Jumlah Laporan Keuangan SKPKD	BPKD	1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen, 3. 1 dokumen	250,000,000.00	APBD		1. 1 dokumen, 2. 1 dokumen, 3. 1 dokumen	275,000,000.00
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan penyimpangan pada objek pemeriksaan	BPKD	1 dokumen	190,000,000.00	APBD		1 dokumen	209,000,000.00
5	02	02	2.03	07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Jumlah OPD yang memiliki data pendapatan, belanja dan pembiayaan yang direkon	BPKD	44 OPD	15,000,000.00	APBD		44 OPD	16,500,000.00
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	BPKD	1 dokumen	90,000,000.00	APBD		1 dokumen	99,000,000.00
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	BPKD	1 dokumen	19,205,257.00	APBD		1 dokumen	21,125,782.70

5	02	02	2.03	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah	BPKD	44 OPD	65,000,000.00	APBD		44 OPD	71,500,000.00
5	02	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan	Jumlah dokumen dana hibah dan bansos dan bantuan keuangan khusus yang tersalurkan	BPKD	14 dokumen	93,712,500.00	APBD		14 dokumen	103,083,750.00
5	02	02	2.04	01	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pinjaman pemerintah daerah	BPKD	2 dokumen	45,000,000.00	APBD		2 dokumen	49,500,000.00
5	02	02	2.04	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Jumlah terlaksananya alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus	BPKD	12 kali	48,712,500.00	APBD		12 kali	53,583,750.00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Persentase BMD yang tercatat dengan akurat, 2. Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat, 3. Persentase BMD yang tertib	BPKD	1. 100%, 2. 100%, 3. 61%	575,000,000.00	APBD		1. 100%, 2. 100%, 3. 65%	632,500,000.00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	BPKD	1 dokumen	575,000,000.00	APBD		1 dokumen	632,500,000.00
5	02	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai aturan	BPKD	70%	25,000,000.00	APBD		70%	27,500,000.00
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah	BPKD	80%	100,000,000.00	APBD		80%	110,000,000.00
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase barang yang terinventarisir	BPKD	70%	75,000,000.00	APBD		70%	82,500,000.00
5	02	03	2.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah OPD pelaksanaan pengamanan fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	BPKD	44 OPD	75,000,000.00	APBD		44 OPD	82,500,000.00
5	02	03	2.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKD	7 dokemen	100,000,000.00	APBD		7 dokemen	110,000,000.00
5	02	03	2.01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan rekon penyusunan laporan barang milik daerah	BPKD	44 OPD	30,000,000.00	APBD		44 OPD	33,000,000.00
5	02	03	2.01	12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah OPD	BPKD	44 dokumen	120,000,000.00	APBD		44 dokumen	132,000,000.00
5	02	03	2.01	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah	BPKD	44 OPD	50,000,000.00	APBD		44 OPD	55,000,000.00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD, 2. Persentase Pencapaian Target PAD	BPKD	1. 95%, 2. 94%	1,303,000,000.00	APBD		1. 95%, 2. 95%	1,433,300,000.00
5	02	04	2.02		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	1. Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak, 2. Persentase Penerimaan PAD	BPKD	1. 1 dokumen, 2. 100%,	1,303,000,000.00	APBD		1. 1 dokumen, 2. 100%,	1,433,300,000.00
5	02	04	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah penerbitan SPPT dan DHKP	BPKD	180000 lembar SPPT dan 600 buku DHKP	70,000,000.00	APBD		180000 lembar SPPT dan 600 buku DHKP	77,000,000.00
5	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen objek pajak	BPKD	1 dokumen	100,000,000.00	APBD		1 dokumen	110,000,000.00
5	02	04	2.02	03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dan daftar objek pajak yang terdata	BPKD	20%	125,000,000.00	APBD		20%	137,500,000.00

5	02	04	2.02	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah regulasi dan kebijakan tentang pajak daerah yang diterbitkan	BPKD	2 dokumen	15,000,000.00	APBD		2 dokumen	16,500,000.00
5	02	04	2.02	05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan	BPKD	17 kali	83,000,000.00	APBD		17 kali	91,300,000.00
5	02	04	2.02	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah aplikasi pajak daerah online	BPKD	3 aplikasi	150,000,000.00	APBD		3 aplikasi	165,000,000.00
5	02	04	2.02	07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Jumlah kegiatan sosialisasi cukai tembakau	BPKD	1 kali	100,000,000.00	APBD		1 kali	110,000,000.00
5	02	04	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase data pajak yang diinput ke sistem online pajak daerah	BPKD	100%	100,000,000.00	APBD		100%	110,000,000.00
5	02	04	2.02	09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah data pajak yang dimutakhirkan dan diinventarisir	BPKD	1 dokumen	100,000,000.00	APBD		1 dokumen	110,000,000.00
5	02	04	2.02	10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Persentase data objek pajak yang valid	BPKD	100%	60,000,000.00	APBD		100%	66,000,000.00
5	02	04	2.02	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.Persentase Data Objek Pajak dan retribusi yang Valid, 2. Persentase Piutang PBB yang Teridentifikasi	BPKD	1. 100 %, 2. 20%	400,000,000.00	APBD		1. 100 %, 2. 20%	440,000,000.00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program- program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan OPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Parit Malintang, 05 Mei 2020

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



MASRI, ST, MM
NIP. 19691122 199403 1 004